

***Evaluation of the Keputusan Menteri Dalam Negeri Number 17 at 2000 about Human Resources Management Information System within The City of Pemalang***

By :

Dino Angga Lesmana, Aufarul Marom \*)

**Public Administration**

**Faculty of Social and Political Science**

**Diponegoro University**

Prof. Soedharto SH St., Kampus Tembalang, Semarang City

Email : teruterubosu93@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate of the implementation of the Keputusan Menteri Dalam Negeri Number.17 of 2000 about Human Resources Management Information System which is applied in the Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Badan Kepegawaian Daerah Pemalang Regional and describe the factors that support and obstruct the implementation of the policy. This study uses three main aspects, namely the system and the four factors that affect by qualitative descriptive approach. Data collection techniques were used observation, interviews, documentation and literature study with the informant of employees Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.*

*Based on the results of the study, researchers concluded that the results of the evaluation of the implementation of Keputusan Menteri Dalam Negeri Number.17 of 2000 on Human Resources Management Information System applied in the Badan Kepegawaian Daerah Pemalang Regional has been well. This is indicated by the clarity of access, timetables and mechanisms of the program activities and services that systematic implementation of the tasks according to the procedure, successfully serving the SIMPEG data process consideration decision making, evaluation of e-file is routinely conducted, applying the principle of transparency of information and have a proactive attitude in refining the program to successfully develop online SIMPEG, Management Information System performance Analysis and Mapping Management Information Systems Master. It's only that they found several inhibitors that cause results still not maximized, such as the limited number of executive staff, executive staff competence is still not evenly distributed, using the old SOPs and the lack of participation of civil servants to actively evaluate their own data.*

*To overcome these problems, there are some suggestions that can be done such as system development should be supported by education and training as increased capacity and competence of staff implementing evenly, fix the coordination to support the data updating, create SOPs / guidelines contain standards to assess whether it is appropriate with the purpose or not, and disseminate to all civil servants to actively evaluate the data itself through the access rights granted.*

**Keywords : Evaluation, System, Program, Human Resource Management Information, Coordination**

**Evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000  
tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)  
di Kabupaten Pemalang**

**By :**

Dino Angga Lesmana, Aufarul Marom \*)

**Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email : teruterubosu93@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diterapkan di Subbidang dokumentasi dan pengolahan data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga aspek utama sistem yaitu dan empat faktor yang mempengaruhi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan informan dari pegawai Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kejelasan akses, jadwal dan mekanisme program kegiatan dan pelayanan yang sistematis, pelaksanaan tugas sesuai prosedur, berhasil menyajikan hasil pengolahan data SIMPEG sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, evaluasi e-file yang rutin dilakukan, menerapkan asas keterbukaan informasi dan memiliki sikap proaktif dalam menyempurnakan program hingga berhasil mengembangkan SIMPEG online, Sistem Informasi Manajemen Analisis Kinerja dan Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Guru. Hanya saja masih ditemukan beberapa penghambat yang menyebabkan hasil masih belum maksimal, seperti keterbatasan jumlah staff pelaksana, kompetensi staff pelaksana yang masih belum merata, masih menggunakan SOPs yang lama dan minimnya partisipasi pegawai negeri sipil untuk aktif mengevaluasi datanya sendiri.

Di dalam mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa saran yang dapat dilakukan seperti pengembangan sistem harus ditunjang dengan pendidikan dan pelatihan sebagai peningkatan kemampuan dan kompetensi staff pelaksana secara merata, membenahi koordinasi untuk mendukung pembaruan data, membuat SOP/pedoman yang berisi standar untuk menilai apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum, dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai negeri sipil untuk aktif mengevaluasi data dirinya melalui hak akses yang diberikan.

**Kata Kunci : Evaluasi, Sistem, Program, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Koordinasi**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi sangat mempengaruhi pemerintah di masa modern terutama dalam melayani masyarakat, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional. Inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada, supaya dapat secara benar menempatkan perannya. Informasi memungkinkan masyarakat dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks.

Perkembangan teknologi informasi terjadi di bidang pemerintahan, yang disebut dengan *e-Government*. *Electronic Government* atau yang sering kita sebut dengan *e-gov* menjadi jalan keluar pemanfaatan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat ini. Menurut Indrajit (2006) dalam akadun (2009), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : *Wide Area Network*, *Internet* dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. *E-governent* merupakan penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah memfokuskan diri pada pengembangan *e-government* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Konsep Pemerintah dapat lebih efektif dan efisien apabila ditunjang dengan sistem *digital* untuk menjalankan tugasnya terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

*E-government* saat ini telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang luas, dan teknologi

informasi berbasis komputer tersebut dapat memudahkan dalam manajemen sumber daya aparatur dibanding dengan proses yang dilakukan secara manual. Proses pengembangan sumber daya aparatur berupa proses pengembangan pegawai, pembinaan pegawai, serta sampai pencatatan para pegawai. Dengan adanya pengembangan sistem informasi di suatu pemerintahan akan memudahkan para pegawai dalam menyimpulkan data dan informasi dengan lebih baik.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatan membuka peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi yang dilaksanakan dengan baik menciptakan rantai proses kerja administrasi baru yang lebih pendek. Rantai tahap proses kerja akan terhapus beberapa tahap yang mungkin bisa dihilangkan atau diminimalisir. Dengan begitu akan tercipta rantai proses kerja baru yang lebih efisien dan efektif. Pemanfaatan teknologi guna mengoptimalkan tahap proses kerja system administrasi pemerintah dapat dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM memiliki peran dalam pelayanan publik dari sisi peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan dari berbagai cara pengolahan data dalam SIM yang diperlukan untuk manajemen organisasinya. Informasi yang dihasilkan oleh SIM dapat digunakan organisasi untuk membuat keputusan, melihat masalah dalam organisasi dan menyiapkan pemecahannya.

Pada dasarnya bila terkait pengelolaan SDM pemerintah yang baik salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berkaitan erat dengan kepegawaian. SIMPEG adalah system informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengelolaan data, prosedur, tatakerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan

informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

Hal ini terkait juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri bahwa pembangunan dan pengembangan SIMPEG penting untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja administrasi kepegawaian.

Pembangunan SIMPEG dimaksudkan untuk memberikan informasi dan menyediakan data PNS yang lebih tersusun dengan baik sebagai bahan analisis dalam menunjang pengambilan keputusan, dengan kata lain data yang dihasilkan sangat berguna bagi pemimpin dalam mendukung pengambilan keputusan. Dalam SIMPEG pada setiap akun tertera data-data kepegawaian dari Pegawai yang dibagi dalam beberapa modul seperti data pribadi, data pendidikan, riwayat diklat, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, kenaikan gaji mutasi dan pensiun dll. SIMPEG sudah diterapkan di beberapa instansi pemerintah, salah satu instansi yang mengaplikasikannya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Walikota selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Permasalahan yang utama adalah jumlah sumber daya aparatur yang masih relatif besar, bukan tidak mungkin pemerintah memiliki rencana program atau kegiatan yang membutuhkan data-data Pegawai yang disediakan dengan cepat. Oleh karena itu perlu pengelolaan data yang baik agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Pembagian tugas antar instansi atau unit yang kurang jelas, menyebabkan munculnya aparatur yang kurang profesional, dan prosedur standar yang

belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan yang masih belum efektif. Hal ini merupakan bukti, bahwa suatu organisasi maupun para aparatur belum bisa mengatur para aparatur secara maksimal serta mengarahkan para pegawai menjadi pegawai yang profesional di bidangnya.

Selain itu, sistem informasi kepegawaian memudahkan pegawai dalam memasukkan data pegawai, agar data pegawai tersebut disimpan dengan rapi dan dapat memudahkan pengolahan data kepegawaian. Data-data tersebut tidak berserakan yang akan menyebabkan suatu arsip data kepegawaian menjadi hilang. Perancangan suatu sistem yang optimal dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer yang dapat diintegrasikan disuatu *server database*. Seperti jika dilihat dari data tabel jumlah PNS di Kabupaten Pemalang berikut ini :

Dengan Jumlah PNS yang mencapai puluhan ribu maka peran SIMPEG membantu dari efisiensi dan efektifitas. Selain itu, strategi yang dilakukan pemerintahan khususnya dalam penerapan sistem informasi kepegawaian dimaksudkan untuk membentuk sumber daya aparatur yang profesional dibidangnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Program SIMPEG berjalan dengan baik jika dilihat dari kualitas SDM yang menjadi operator ataupun Pegawai yang menjadi sasaran dalam akan dikelola datanya. Ketika Program SIMPEG ini diimplementasikan tidak diketahui kondisi dari kesiapan SDM yang ada, apakah mencukupi atau minim. sehingga pasti ada Kegiatan seperti Penyuluhan program atau yang lain sebagai program pendukung. Bukan tidak mungkin masih banyak Pegawai yang tidak menguasai bahkan tidak menguasai Program SIMPEG itu dan bagaimana mereka menjalankan Program tersebut. Jadi belum ada kejelasan Kuantitas SDM pengelola data dan Pegawai yang didata.

Tekait dengan Kepmendagri No.17 Tahun 2000, selain itu yang menjadi

alasan BKD Pemalang menjadi lokasi Penelitian adalah dari pengamatan peneliti, dari pencarian di internet mengenai Program SIMPEG di BKD Pemalang tidak dapat ditemukan. Dari hasil pencarian hanya ditemukan pengumuman untuk para Pegawai Negeri Sipil melakukan *update* atau pembaharuan Data pribadi dalam Pogam SIMPEG. Tidak ditemukan bagaimana Program SIMPEG dijalankan, Sosialisasi program dilakukan untuk memastikan kesiapan sasaran dan hasil dari Program tersebut. Tidak diketahui data tersebut berlaku untuk berapa lama, bagaimana jika Pegawai tersebut sudah tidak lagi bekerja (Pensiun/meninggal) atau mutasi (pemindahan) diperlukan kejelasan tentang tenggat pemutakhiran data.

Untuk mengetahui bagaimana proses pengaplikasian Program SIMPEG, Tata cara pengisian data, penyuluhan program pendukung yang dilakukan sebelumnya, Proses implementasinya dan bahkan *website* untuk para Pegawai mengisi data dalam Program SIMPEG dapat dengan mudah diakses. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Dalam Negeri No.17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kabupaten Pemalang.”

## **1.2 Tujuan**

Menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan Keputusan Dalam Negeri No.17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kabupaten Pemalang. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Keputusan Dalam Negeri No.17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

## **1.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.3.1 Administrasi Publik**

Administrasi Publik merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan yang disusun untuk mengatur kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan dan

diselenggarakan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan umum. Proses penyelenggaraan dan pengaturan kerjasama mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik untuk merealisasikan tujuan Administrasi Publik itu sendiri.

### **1.3.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan pemerintah tentang ketentuan untuk melakukan suatu tindakan ataupun tidak mengenai permasalahan yang muncul dalam lingkup publik. Pemerintah dalam pengambilan keputusan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam keputusan tersebut pasti memiliki dampak baik positif atau negatif, sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara.

### **1.3.3 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan menjadi fokus utama, apakah kebijakan itu sudah diterapkan dengan baik, melalui proses yang bisa dilakukan dengan kegiatan atau aktivitas yang akan mendapatkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi SIMPEG merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitasnya dalam melayani masyarakat.

### **1.3.4 Implementasi Kebijakan George Edward III**

Menurut George Edward III dalam Nugroho (2009:512) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* ( tanpa implementasi yang

efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil).

Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi (Agustino, 2006: 156) :

a. Faktor Komunikasi

Indikator dalam faktor komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

b. Faktor Sumberdaya

Indikator dalam faktor sumberdaya adalah Staff, fasilitas, pemahaman implementor, wewenang dan informasi.

c. Faktor Disposisi

Indikator disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi adalah SOPs dan fragmentasi.

### 1.3.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Dengan asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

### 1.3.6 Sistem

Sistem dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu totalitas himpunan benda – benda atau bagian-bagian yang satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga suatu kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Muninjaya

(1999) mendefinisikan Sistem sebagai suatu rangkaian komponen atau bagian yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan yang jelas.

### 1.3.7 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah system informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Melihat SIMPEG sebagai sebuah sistem berarti SIMPEG juga memiliki aspek utama yakni input, proses dan output. Menurut Veithzal Rivai dan Ella Jauvani sagala (2005: 534), menyatakan ada tiga komponen fungsional utama dalam setiap Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Komponen tersebut terdiri dari :

a. Input

Masukan-masukan dari SIMPEG serupa dengan sistem manual yang terdiri dari informasi pegawai, kebijakan-kebijakan dan prosedur SDM dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya harus disertakan dalam sebuah SIMPEG. Selain itu faktor input yang lain diantaranya seperti Pelaksana SIMPEG, fasilitas pendukung dan anggaran yang digunakan dan data dasar.

b. Proses

Proses dalam suatu sistem merupakan transformasi masukan menjadi keluaran. Proses pada sistem informasi manajemen tertuju pada fungsi pengolahan data yaitu setelah data diproses oleh fungsi input, fungsi pengelolaan data mengelola kualitas data yang disimpan. Fungsi ini memperbarui, menambah data baru dan menghilangkan data yang sudah tidak diperlukan pada database.

c. Output

Output adalah fungsi yang memperlihatkan sebenarnya manfaat dari sebuah sistem yang berjalan. Untuk menghasilkan output membutuhkan

kalkulasi-kalkulasi dari hasil proses yang kemudian dipresentasikan dalam cara yang dimengeti pengguna informasi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.1 Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)**

Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu cara untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program kerja di bidang dokumentasi dan pengolahan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berjalan memberi gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan program – program kerja yang telah disusun. Sebuah sistem memiliki tahapan utama yaitu input, proses dan output sehingga agar dapat menggambarkan hasil analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya peneliti mendeskripsikan dari ketiga tahapan tersebut.

##### **1) Input**

###### **a. Staff pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi staff pelaksana SIMPEG Subbidang doklahta ditunjang dengan diklat yang dilaksanakan langsung oleh Provinsi Jawa Tengah secara langsung secara rutin yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 lalu. Kuantitas tenaga pelaksana SIMPEG dalam Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data belum mencukupi untuk menjalankan seluruh

tugas pada Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data. Jumlah tenaga pelaksana SIMPEG dalam Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data hanya terdiri dari 3 orang dan mengolah data 13.361 data pegawai seKabupaten Pematang Jaya.

###### **b. Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian, anggaran SIMPEG disusun melalui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) sebelum diajukan sebagai RAPBD. Perencanaan penganggaran disusun oleh Sekretariat yang sudah diajukan oleh Bidang Dokumentasi dan pengolahan data untuk rencana penggunaan anggarannya.

Anggaran pelaksanaan SIMPEG diperoleh dari APBD. Anggaran pelaksanaan SIMPEG digunakan untuk kegiatan seperti : pelatihan dan pendidikan untuk tenaga pelaksana, sewa tenaga kontrak, evaluasi, pengembangan sistem, dan pengadaan peralatan

Ketersediaan anggaran pelaksanaan SIMPEG sudah baik, meskipun timbul masalah anggaran yang tidak memadai selama ini berhasil diselesaikan dengan baik. Kekurangan anggaran pelaksanaan SIMPEG dapat diajukan pada bulan Agustus dan akan turun pada bulan Oktober bersama dengan pengajuan penambahan APBD dilakukan saat jumlah anggaran tidak memadai hingga semester berakhir.

###### **c. Fasilitas Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan Prasarana pelaksanaan SIMPEG di bidang dokumentasi dan pengolahan data BKD Kabupaten Pematang Jaya terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. *Hardware* : Komputer/PC/Laptop, printer, server, mesin fax, alat tulis.

b. *Software* : Program SIMPEG, SIMTARU, SIMANJA

Berdasarkan paparan hasil penelitian, dapat diketahui fasilitas pendukung sudah baik dan kelengkapan sarana dan prasarana sudah baik setiap kebutuhan peralatan sudah tersedia. Fasilitas pendukung baik karena selalu dilakukan pengawasan kinerja peralatan oleh staff pranata

fungsional komputer bidang dokumentasi dan pengolahan data. Pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai kinerja sarana dan prasarana yang *out of date* untuk diperbarui agar tidak menghambat pelaksanaan SIMPEG. Pendukung baiknya sarana dan prasarana di bidang dokumentasi dan pengolahan data selain dengan pengawasan untuk pembaruan peralatan juga didukung dengan sistem perawatan yang baik untuk meminimalkan pengeluaran.

#### **d. Data Dasar**

Data dasar adalah komponen utama dalam tahap input pelaksanaan SIMPEG. Data dasar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang diinput ke dalam program untuk diolah menjadi laporan kepada pengguna. Data dasar SIMPEG terdiri dari data statis dan data dinamis.

Data-data dasar PNS Kabupaten Pemalang yang tertera di dalam SIMPEG terbagi ke dalam modul riwayat pegawai yang terdiri dari 14 bagian pendataan kepegawaian yaitu : Data Pribadi, Posisi dan Jabatan, Data Lainnya, Informasi Status Pegawai, Riwayat Kenaikan Pangkat, Riwayat Jabatan, Riwayat Kenaikan Gaji Berkala, Riwayat Tugas Tambahan, Riwayat Kerja Pegawai, Riwayat Diklat, Riwayat Pendidikan, Riwayat Penghargaan, Riwayat Hukuman Disiplin, Data Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, data dasar yang menurut pada SIMPEG yang ada di Subbidang dokumentasi dan pengolahan data BKD Kabupaten Pemalang sudah baik dilihat dari kelengkapan data dasar yang sesuai dengan UU No.5 tahun 2014.

### **2) Proses**

#### **a. Pengolahan Data**

Berdasarkan hasil penelitian, proses SIMPEG terdapat pada modul rekap dan laporan yang terdiri dari : Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Nominatif Pegawai Berdasarkan Jabatan, Rekap Tugas Tambahan, Rekap Pensiun, Rekap Hukuman Disiplin, Peta Jabatan, Rekap

Pendidikan, Rekap Jabatan Sekdes, Nominatif Pegawai yang berulang tahun.

BKD Kabupaten Pemalang menempati peringkat kedua dalam sinkronisasi data kepegawaian daerah dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara melalui E-Pendataan Ulang PNS (E-PUPNS) pada tahun 2015. Dengan hasil tersebut membuktikan keakuratan data yang dihasilkan SIMPEG BKD Kabupaten Pemalang. Keberhasilan BKD Kabupaten Pemalang dibuktikan dengan berhasil mengembangkan SIMPEG ke dalam sistem informasi kepegawaian bentuk lain yang menunjang kinerja kepegawaian yaitu Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Guru (SIMTARU) dan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja (SIMANJA).

### **3) Output**

#### **a. Laporan Akhir**

Berdasarkan paparan hasil penelitian, output dari SIMPEG di bidang dokumentasi dan pengolahan data BKD Kabupaten Pemalang adalah display dari modul rekap dan laporan. Hasil dari pencetakan modul rekap dan laporan yang digunakan Bupati dalam pengambilan keputusan. Hasil cetak modul rekap dan laporan juga dibuatkan menjadi laporan akhir SIMPEG setiap tahun yaitu Laporan PNS dalam Angka. Output dari pelaksanaan SIMPEG di bidang dokumentasi dan pengolahan data BKD Kabupaten Pemalang sudah baik karena isi dari Laporan PNS dalam Angka terbilang lengkap dengan tertera seluruh hasil akumulasi data-data kepegawaian dalam pelaksanaan SIMPEG yang disertai dengan statistik dalam bentuk diagram. Selain itu juga masyarakat dapat mengaksesnya karena diupload di website BKD Kabupaten Pemalang dan dapat diunduh sehingga asas keterbukaan informasi melalui pemberian informasi berjalan dengan baik.

### **2.2 Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan SIMPEG**

#### **a. Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi, dapat diketahui bahwa kondisi komunikasi di bidang dokumentasi dan pengolahan data berjalan dengan baik. Setiap seksi bidang dokumentasi dan pengolahan data dapat mentransmisikan informasi antar unit dengan baik dan tidak ada masalah, baik antar staff atau antara staff dengan atasan/pegawai dengan jabatan di atasnya. Komunikasi bidang dokumentasi dan pengolahan data sudah dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang dapat mendukung transmisi komunikasi berjalan dengan baik. *Penyaluran informasi sudah jelas dan konsisten yang meminimalkan miskomunikasi antar unit.* Rapat internal bentuk komunikasi yang dilakukan bidang dokumentasi dan pengolahan data kepada staffnya untuk menentukan rencana kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan baik seperti rencana pengembangan SIMPEG menjadi SIMTARU dan SIMANJA.

#### **b. Sumberdaya**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai SDM/staff, dapat diketahui bahwa bidang dokumentasi memiliki staff yang kompeten karena memiliki basic pendidikan yang sesuai dengan tugas kerjanya saat ini. Dari ketiga staff pelaksana SIMPEG memiliki pendidikan di bidang Ilmu Komputer yaitu 2 orang S-1 Ilmu Komputer dan 1 orang D-3. Namun, dari jumlah tenaga ada kekurangan pegawai yang menyebabkan bidang dokumentasi dan pengolahan data menyewa tenaga kontrak. Kondisi sarana prasarana sudah baik yang didukung oleh sistem pengawasan dari pranata fungsional komputer untuk menjaga kinerja peralatan belum tertinggal/*out of date*. Selain itu didukung dengan perawatan yang baik agar tidak selalu melakukan pembaruan saat kinerja peralatan menurun sehingga meminimalisir penggunaan anggaran.

#### **c. Disposisi**

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik badan pelaksana SIMPEG di bidang dokumentasi dan pengolahan data BKD

Kabupaten Pematang Lihai dilihat dari kriteria pengangkatan personil sudah baik dan tepat dibuktikan dengan pengembangan *software* SIMPEG yang dibuat sendiri dan mengembangkan SIMPEG menjadi SIMTARU (Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Guru) dan SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja) yang hanya ada di BKD Kabupaten Pematang Lihai. Selain itu juga dibuktikan dengan berhasil memperoleh peringkat kedua untuk Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada E-PUPNS. BKD Kabupaten Pematang Lihai tidak menerapkan insentif dalam peningkatan kinerja. BKD Kabupaten Pematang Lihai menerapkan penghargaan dan hukuman disiplin yang tertera pada modul di dalam SIMPEG dan menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kedisiplinan. Namun, penghargaan dapat dikatakan hampir tidak berjalan sehingga kurang memberi dampak terhadap kinerja dan dari hukuman disiplin sudah dijalankan terbukti dengan adanya 1 orang pegawai yang diberhentikan dan 8 orang pegawai pemberhentian sementara (*skorsing*).

#### **d. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian SOPs terkait pelaksanaan SIMPEG di BKD Kabupaten Pematang Lihai sudah baik dari kelengkapan, kejelasan dan kemudahan untuk dipahami. Namun, kekurangan karena masih menggunakan SOPs yang lama karena seharusnya dari perubahan struktur yang ada harus ada pergantian SOP yang baru tetapi sudah memiliki Buku Panduan SIMPEG yang lengkap. Fragmentasi (pembagian tanggung jawab) sudah berjalan dengan baik dengan pembagian pelaksanaan SIMPEG di beberapa bagian seperti pada operator/staff pelaksana penginput data di setiap bidang dalam administrasi SIMPEG, Pengendali Sistem Informasi, Pranata Fungsional Komputer dan Pengendali Jaringan. Namun, kekurangan ada pada ketergantungan terhadap salah satu staff di bidang dokumentasi dan pengolahan data untuk

menanggulangi *trouble* yang muncul sehingga mengalami kesulitan saat staff tersebut tidak ada.

## **PENUTUP**

### **3.1 Simpulan**

#### **3.1.1 Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dari analisis pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian pada tahapan utama dari pelaksanaan system pada BKD Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Input, Proses dan Output. Input pelaksanaan SIMPEG sudah cukup baik dari SDM/staff pelaksana yang kompeten, anggaran yang sudah mencukupi, fasilitas pendukung yang memadai dan selalu dilakukan perawatan untuk menjaga kinerjanya dan data dasar yang lengkap dan akurat sesuai dengan regulasi. Pengolahan data pada tahap proses berjalan dengan baik, data pada SIMPEG BKD Kabupaten Pemalang sudah sinkron dengan BKD pusat Baik Daerah Provinsi dan juga BKN. Bahkan berhasil dilakukan pengembangan SIMPEG menjadi sistem informasi manajemen yang baru yaitu SIMTARU dan SIMANJA. Evaluasi rutin dilakukan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh SKPD. Hasil pengolahan data pada tahap output dapat menjalankan peran dengan baik guna membantu sebagai bahan pengambilan keputusan dan Laporan akhir pelaksanaan SIMPEG yang dipublikasikan di website BKD Kabupaten Pemalang yaitu [bkd.pemalangkab.go.id](http://bkd.pemalangkab.go.id).

Masalah terdapat pada jumlah staff pelaksana SIMPEG yang masih kurang bila dibandingkan dengan tupoksinya dan masih ketergantungan terhadap staff tertentu dalam menjaga dan menanggulangi *trouble* yang muncul pada system. Belum adanya pengawasan bagi

pengambil keputusan apakah sudah mengikuti hasil pengolahan SIMPEG dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Kesalahan penginputan data yang membuat data ganda di dua daerah pada waktu yang sama dan masih menggunakan SOP yang lama.

#### **3.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan SIMPEG di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data BKD Kabupaten Pemalang**

Berikut ini merupakan faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan SIMPEG di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data. Faktor pendorong pelaksanaan SIMPEG di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data antara lain sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memiliki staff/pegawai pelaksana SIMPEG yang kompeten dengan melakukan pelatihan yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan memiliki dasar pendidikan yang sesuai.
- b. Sarana prasarana yang ada memiliki kualitas yang baik karena selalu diperbarui dan dilakukan perawatan yang baik.
- c. *Software* SIMPEG diperbarui dengan *software* yang dibuat sendiri oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan instansi.
- d. Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan Data hubungan antar pegawai atau antar unit terjalin baik sehingga meningkatkan koordinasi.
- e. Hasil output yang akurat untuk digunakan untuk membantu pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, terbukti dengan keakuratan dan kelengkapan data pada E-PUPNS.
- f. Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan data berhasil mengembangkan SIMPEG ke dalam

bentuk lain yaitu SIMTARU dan SIMANJA yang semakin mengoptimalkan manajemen data-data kepegawaian.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan SIMPEG di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan data antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah pegawai Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan Data sebagai operator SIMPEG yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan memaksa untuk menyewa tenaga kontrak.
- b. Jaringan internet yang masih buruk untuk daerah-daerah tertentu yang mempersulit partisipasi untuk mendukung penerapan Program SIMPEG di Kabupaten Pemalang.
- c. Masih menggunakan SOPs lama yang digunakan untuk Program SIMPEG lama yang belum diperbarui.
- d. Partisipasi PNS Pemalang yang terdata masih minim untuk melakukan akses data dirinya dan melakukan perubahan data pada modul yang diberi akses.
- e. Ketergantungan Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan Data terhadap staff tertentu yang menyebabkan staff-staff lain kesulitan untuk menangani aplikasi SIMPEG yang error.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa hambatan pada pelaksanaan SIMPEG di Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data BKD Kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan keunggulan yang sudah ada. Oleh karena itu, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Selama masih ada moratorium penambahan PNS tidak diperkenankan untuk penambahan PNS sehingga dapat dilakukan dengan menambah staff/pegawai pelaksana dengan sistem PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau kontrak.
- b. Meningkatkan partisipasi PNS untuk memanfaatkan hak akses guna mengevaluasi data dirinya sehingga tidak hanya dari BKD Kabupaten Pemalang tetapi juga dari penerima pelayanan dalam meningkatkan keakuratan dan kelengkapan data.
- c. Memperbarui SOPs agar sesuai dengan standar yang baik dan tidak lagi mengacu pada SIMPEG yang lama.
- d. *Achievement* bukan hanya sekedar menjadi salah satu modul dalam SIMPEG, tetapi juga benar-benar dijalankan untuk memotivasi kinerja staff pelaksana.
- e. Memperbaiki koordinasi untuk menghindari keterlambatan pengupdatean data yang disebabkan data terlambat diterima.
- f. Melakukan pelatihan kepada staff-staff lain agar tidak ketergantungan kepada satu atau dua staff tertentu yang membuat program lambat berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Gramedia
- Anwar, M. Khoirul dan Oetojo S. Asianti. 2004. *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, Richardus, Eko. 2006. *Electronic Government : Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Jogiyanto. 1999. *Analisis Dan Disain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy: Edisi II*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- O'Brien, James A. 2005. *Pengantar Sistem Informasi: Perspektif Bisnis dan Manajerial Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai, Veithzal., & Sagala, Eva Jauvani. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siagian, P Sondang. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med press.
- W.L Neuman. 2003. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage.